

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: B/324/KPTS/03/2025

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor B/207/KPTS/03/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa sehubungan adanya Perubahan tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati sesuai dengan Kebutuhan ada maka Keputusan Bupati B/207/KPTS/03/2025 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran

2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini.

KEDUA : Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana

dimaksud diktum Kesatu dapat dilakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan kebutuhan dan

Perundang-undangan.

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor: B/207/KPTS/03/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025 dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka

akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 17 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;

2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;

3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;

4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR: B/324/KPTS/03/2025 TANGGAL: 17 September 2025

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025

No	Judul Rancangan Peraturan Bupati	Perangkat Daerah Pemrakarsa
1 2	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis	Dinas Kominfo
3	Elektronik Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Liwa	Dinas PU&PR
4	Kajian Resiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan Jalan Umum sebagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
7	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat	Dinas Ketahanan Pangan
9	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dibidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
10	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029	D PPKBPP & PA
11	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tubekulacasi Tahun 2025-2030	Dinas Kesehatan
13	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Nutrisi Lansia Pusat kejahteraan sosial dan sistim layanan rujukan terpadu Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
15	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Upaya	RSUD Alimudddin Uma
16	Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro	
	Jenis Tipe Pelayanan Pasar Penyelenggaraan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	Dinas Koperasi Ukm
	Pengembangan Inkubator Pada Pusat Layanan Terpadu Koperasi dan UKM	
	Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Pasar Secara Elektronik	
22	Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah Beasiswa Pendidikan Seni Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata Beasiswa Pendidikan bagi mahasiswa Strata Satu Bahasa Lampung	Dinas Pendidikan

	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak	
	Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
	Daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN Pada	
	Satuan Pendidikan Negeri	
	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026	
28	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	
29	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1	
	Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan	
	Pegawai	
30	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun	
	2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 🛭	
	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
31	Teknis Pemberian Tunjangan hari Raya dan Gaji	
	Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD Tahun 2025	
	Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026	
33	Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Penyetaraan	
	dilingkungan Pemerintah Daerah	
	Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	
	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun	
	2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan	BKAD
	Dinas	DIVID
36	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun	
	2022 tentang Transaksi Non Tunai	
	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
	Tahun Anggaran 2024	
	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun	
	2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan	
	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	
39	Properti Investasi	
	Pedoman Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi	
	dan Pelaporan Barang Milik Daerah	
1	Standar Sarana dan Prasarana Kantor dilingkungan	
	Pemerintah Daerah	
	Kebijakan Akuntansi	
	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	
	Indeks Pengelolaan Aset	WENT
	Wajib Pungut Pajak Daerah	
i .	Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	
	Perdesaan dan Perkotaan	
47	Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas	
<u> </u>	Tanah dan/atau Bangunan	
	Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah	
49	Pembebasan Bea Perolehan Hak atas tanah	
İ	dan/atau Bangunan Peserta Kegiatan Pendaftaran	
<u></u>	Tanah Sistematis Lengkap	
50	Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan	Bapenda
	Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak	*
	Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak	
	Mineral Bukan Logam dan Batuan	
	Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah	
52	Pemberian dan Pemanfataan Insentif Pemungutan	
	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
53	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Opsen Mineral	
	Bukan Logam dan Batuan	
54	Tata Cara Penghitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak	
L	Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Pekon	

	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	
56	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun	
	2025	
57	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-	
	2029	
58	Penetapan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah	Daday Dayanaanaa
	Tahun 2026	Badan Perencanaan
59	Indikator Kinerja Utama 2025-2029	Pembangunan Daerah
	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi berbasis	
	Potensi Sumber Daya Lokal	
	Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting	
		Dinas Pemuda Olahraga
02	Seminung Lumbok Resort	dan Pariwisata
63	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	Dinas Perkebunan
	Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Aparatur Sipil	Dillas i circoanaii
	1	
	Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	
၂ ၀၁	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan	
	Pemerintah Daerah	
66	Pedoman disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan	
	Perjanjian Kinerja	
67	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 tahun	D17D 153 1
	2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil	BKP DM
	Negara	
68	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun	
	2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan	
	Ujian Penyesuian Ijazah Kenaikan Pangkat	
69	Batas Pekon di Kecamatan Balik Bukit	
70	Batas Pekon di Kecamatan Suoh	
71	Batas Pekon di Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
72	Batas Pekon di Kecamatan Sukau	
73	Batas Pekon di Kecamatan Lumbok Seminung	
74	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan	
	Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025	
75	Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran	
	2025	D: DMD
76	Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon	Dinas PMP
-	Kepada Setiap Pekon Tahun Anggaran 2025	
77	Pedoman Pendirian Pengurusan Pengelolaan dan	1
-	Pemberhentian Badan Usaha Milik Desa	
78	Pedoman Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan	
' '	Pemerintahan Pekon Dalam Pembangunan Pekon	
79	Tata Cara Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai	1
	Pelaksanaan APB Pekon	
80	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	
~	Pemerintah Daerah	
81	Pedoman Audit Kinerja Pada Perangkat Daerah	Inspektorat
"	Tahun 2024	
80	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Dinas Perpustakaan
	Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
33	Nomor 5 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem	
	Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan	
01		-
04	Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah	1
0.5		Bagian Organisasi
	Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah	-{
80	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun	
	2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan	
1		

	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	Sekretariat DPRD
	Pedoman Pelaksana Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan	Bagian Kesra
1	Masyarakat	
89	Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Bagian Tata Pemerintahan
	Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah	Bagian Umum
91	Panitia Seleksi BUMD	Bagian Perekonomian
92	Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja	Bagian administrasi Pembangunan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS